

Implementasi Standar Audit 500 pada Prosedur Audit Kas Oleh KAP X: Studi Kasus pada BLUD

Bagus Budi Bowo Leksono ¹⁾, Astrini Aning Widoretno ^{2*)}

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: Astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

This study aims to evaluate the appropriateness of the audit procedures for the cash account conducted by Public Accounting Firm (KAP) X at a Regional Public Service Agency (BLUD) with the provisions stipulated in Auditing Standard (SA) 500 concerning audit evidence. This research employed a qualitative descriptive method. Data were obtained through direct observation and documentation of various audit evidence, such as cash reconciliation results, official reports of physical cash counts (cash opname), and bank balance confirmations. The results of the study indicate that the audit procedures implemented by KAP X are in accordance with the provisions of SA 500. This is reflected in the execution of procedures such as the verification of cash balances, periodic physical examinations, the application of analytical procedures, external (third-party) confirmations, evaluation of cash account transactions, and the disclosure of cash information in the financial statements. All these steps support the acquisition of sufficient and reliable audit evidence. Therefore, the audit has contributed to strengthening the accountability of cash management within the BLUD environment. In conclusion, the cash audit practices conducted by KAP X comply with the principles regulated in SA 500 and can serve as a reference for enhancing the quality of audits in the public sector.

Keywords: *Audit, Cash, Cash Count (Cash Opname), Audit Procedures, Auditing Standards, and Regional Public Service Agency (BLUD).*

1. PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah yang diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan umum secara lebih efisien dan efektif. BLUD didirikan dalam upaya untuk mendorong kinerja pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya (Ardyan et al., 2023). Keberadaan BLUD bertujuan agar unit pelayanan publik tidak

hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan juga mampu mengelola pendapatan sendiri dari kegiatan operasional yang sah dan resmi (Sulastiningsih et al., 2022). BLUD diberi ruang untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan kas, pencatatan piutang, hingga pengendalian biaya, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) biasa. Fleksibilitas ini memberikan keunggulan dalam responsivitas layanan serta inovasi keuangan

yang tidak selalu bergantung pada prosedur birokratis panjang.

Namun fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD ini tidak dapat dipandang hanya dari sisi keuntungan. Di sisi lain, entitas BLUD juga menghadapi tanggung jawab yang tinggi dalam mempertahankan integritas pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini tentu memberikan manfaat dalam hal percepatan pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan kinerja keuangan. Namun demikian, fleksibilitas yang tinggi ini juga menuntut tingkat akuntabilitas yang setara (Firmansyah, 2024). Salah satu aspek yang paling krusial dalam konteks pengelolaan keuangan BLUD adalah akun kas. Akun ini memegang peranan vital karena terlibat dalam hampir semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh entitas BLUD. Kas memiliki karakteristik sangat likuid, artinya mudah untuk dikonversi dan disalahgunakan apabila tidak disertai dengan sistem pengendalian internal yang memadai (Wulandari & Khabibah, 2020). Oleh karena itu, penguatan sistem dan prosedur menjadi sangat penting untuk menjamin keuangan BLUD tetap dalam jalur yang akuntabel. Pengelolaan kas di BLUD cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan instansi pemerintahan biasa, karena melibatkan banyak transaksi tunai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembayaran pasien di rumah sakit, penerimaan biaya layanan, dan pengeluaran operasional harian (Chandra et al., 2025). Karakteristik tersebut menjadikan akun kas sebagai salah satu titik rawan terhadap

penyimpangan, baik yang bersifat administratif maupun tindak kecurangan (Pramesti & Azmiyanti, 2024). Kompleksitas ini menuntut kemampuan manajerial dan teknis dari pihak pengelola, termasuk dalam pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat, serta pelaksanaan audit kas yang memadai, menjadi sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan BLUD (Hidayah, 2025). Sistem ini berfungsi sebagai perisai pertama untuk mencegah potensi fraud dan kesalahan pengelolaan dana publik.

Dalam proses audit laporan keuangan, pemeriksaan atas akun kas serta setara kas merupakan tahap penting yang biasanya dilakukan pada tahap akhir audit. Hal ini disebabkan karena kewajaran saldo kas sangat dipengaruhi oleh hasil audit atas akun-akun lain, seperti pendapatan, belanja, dan aset lancar lainnya, kecuali persediaan. Akun kas serta setara kas umumnya bersifat material karena berkaitan langsung dengan kegiatan transaksi yang bersifat tunai dan likuid, serta berdampak langsung pada keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, audit atas akun ini memiliki bobot pengujian yang tinggi dalam penentuan opini auditor. Ketelitian dalam pengujian kas dapat menjadi penentu utama apakah laporan keuangan dapat diyakini atau justru harus mendapat perhatian khusus.

Salah satu unsur penting dalam proses audit adalah pengumpulan bukti audit yang cukup, relevan, dan andal, sebagaimana ditegaskan dalam Standar Audit (SA) 500. Dalam

konteks audit atas kas, prosedur audit yang lazim dilakukan antara lain pemeriksaan fisik kas (*cash opname*), konfirmasi bank, dan rekonsiliasi saldo kas dengan catatan pembukuan (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2021). Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ketepatan prosedur ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hasil audit, tetapi juga membantu organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi kesalahan. Bukti yang valid dan cukup menjadi dasar yang kuat bagi auditor untuk memberikan opini secara objektif dan terpercaya (Pramudyastuti et al., 2025).

Namun, pelaksanaan prosedur audit tersebut dalam praktiknya kerap menghadapi tantangan. BLUD sering kali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi, serta kurangnya pemahaman auditor terhadap karakteristik operasional BLUD yang berbeda dengan instansi pemerintah biasa (Istiqomah & Nisa, 2025). Perbedaan mencolok, misalnya, terletak pada fleksibilitas BLUD dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara langsung tanpa harus melalui prosedur penganggaran yang kaku seperti di SKPD. Oleh karena itu, pendekatan audit terhadap BLUD tidak dapat disamakan dengan pendekatan audit atas instansi pemerintah pada umumnya. Auditor harus memahami prinsip-prinsip tata kelola keuangan BLUD agar dapat menyesuaikan

prosedur audit secara tepat dan kontekstual. Ketidakmampuan auditor dalam memahami nuansa ini dapat menurunkan efektivitas pemeriksaan dan meningkatkan risiko temuan tidak terdeteksi.

Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian kas pada BLUD. Misalnya, di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Bengkulu Selatan, dilaporkan kehilangan dana kas sebesar Rp360 juta pada periode Januari hingga Maret 2024. Dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran, menimbulkan kecurigaan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan atau kelalaian dalam sistem pengendalian internal rumah sakit. Peristiwa ini berpotensi mengganggu opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) yang selama ini diperoleh oleh pemerintah daerah Bengkulu Selatan (Puspita & Budiwitjaksono, 2024). Contoh kasus seperti ini memberikan bukti nyata pentingnya pelaksanaan audit kas yang efektif serta kebutuhan terhadap penguatan regulasi dan kontrol internal.

Fenomena serupa terulang pada kasus yang lebih besar di RSUD Ende, Nusa Tenggara Timur. Polres Ende menetapkan FM, mantan bendahara penerimaan RSUD Ende, sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dana BLUD sebesar Rp1,9 miliar. Modus yang dilakukan mencakup tidak menyetorkan dana ke rekening resmi serta manipulasi laporan penerimaan. Dari jumlah kerugian tersebut, hanya sekitar Rp67 juta yang berhasil disita

oleh pihak berwenang, menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan lemahnya sistem pelaporan keuangan yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban bendahara kepada manajemen rumah sakit. Kasus ini memunculkan kekhawatiran serupa terhadap reputasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit milik pemerintah daerah. Kejadian ini memberikan pelajaran bahwa audit kas bukan hanya formalitas, tetapi kebutuhan mendasar dalam menjaga keberlangsungan institusi layanan publik.

Kasus-kasus tersebut mempertegas pentingnya penguatan sistem pengendalian intern dan efektivitas audit atas akun kas dalam entitas BLUD. Ketidaksesuaian prosedur audit dengan kondisi operasional BLUD dapat menyebabkan lemahnya pengawasan dan mengurangi deteksi dini atas potensi kecurangan atau kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah prosedur audit yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah sesuai dengan Standar Audit (SA) 500, khususnya dalam konteks audit kas pada BLUD yang memiliki karakteristik unik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian prosedur audit kas yang dilakukan oleh KAP X terhadap ketentuan SA 500, dengan mengambil studi kasus pada salah satu BLUD di sektor layanan kesehatan. Melalui pendekatan kualitatif dan kontekstual, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kualitas audit

serta mendorong terciptanya pengelolaan kas yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan BLUD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya memberi manfaat teoritis, namun juga praktis bagi institusi pemeriksa dan pengelola keuangan BLUD.

Dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas publik, audit terhadap akun kas tidak hanya dilihat sebagai kewajiban prosedural, melainkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. BLUD yang mengelola dana publik dituntut untuk menunjukkan integritas dalam setiap transaksi keuangannya. Audit yang dilakukan secara sistematis dan sesuai standar akan membantu mengungkap kelemahan sistemik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah (Fidiana & Retnani, 2023). Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memahami peran strategis audit kas sebagai instrumen tata kelola yang tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga pada reputasi dan legitimasi BLUD. Dalam konteks ini, standar audit seperti SA 500 menjadi pedoman fundamental yang tidak bisa diabaikan oleh auditor sektor publik. Penerapannya secara konsisten akan meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkecil risiko fraud dan mismanajemen dana.

2. METODE

Ditinjau terkait metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian kualitatif sederhana dengan alur

yang dimulai dengan proses atau sebuah peristiwa penjelas yang pada akhirnya ditarik suatu generalisasi yang disebut sebagai kesimpulan (Alfiansyah & Priono, 2024). Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil observasi langsung dan studi dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan audit akun kas oleh KAP X di BLUD, di mana observasi dilakukan untuk melihat proses verifikasi dokumen, konfirmasi bank, trace back, dan pelaksanaan *cash opname* secara langsung di lapangan, sedangkan studi dokumentasi mengumpulkan bukti-bukti pendukung seperti prosedur audit, dokumen audit, dan laporan keuangan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menarik generalisasi yang mencerminkan kesesuaian prosedur dengan Standar Audit 500, dengan penerapan teknik triangulasi guna memastikan validitas dan akurasi temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh hasil sebagaimana yang tertera di tabel berikut.

Tabel1. Keselarasan Prosedur Audit Dengan Standar Audit 500

Aspek	Prosedur Audit Kas oleh KAP X pada BLUD	Standar Audit 500	Keselaras
Verifikasi	Verifikasi saldo	Auditor harus	Sudah sesuai,

Dokumen Keuangan	kas melalui dokumentasi (buku besar, neraca saldo, rekening koran, CALK).	memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan.	karena menca kup verifikasi saldo dengan dokumen keuangan utama.
Pemeriksaan Fisik	Melakukan pemeriksaan kas (<i>cash opname</i>) dan berita acara pemeriksaan.	Bukti fisik lebih dapat diandalkan dibandingkan informasi yang hanya berbasis dokumentasi.	Sudah sesuai, karena saldo kas diperiksa langsung secara fisik.
Prosedur Analisis	Membandingkan saldo kas tahun berjalan dengan periode sebelumnya dan meninjau rasio <i>cash ratio</i> .	Prosedur analitis digunakan untuk mengidentifikasi tren mencurigakan.	Sudah sesuai, karena KAP melakukan analisis perbandingan saldo dan rasio keuangan.
Konfirmasi Eksternal	Melakukan konfirmasi saldo dengan pihak bank dan	Konfirmasi pihak eksternal diperlukan untuk mening	Sudah sesuai, karena ada prosedur rekonsiliasi saldo

	mencocokkan ya dengan neraca.	katkan keandalan bukti audit.	dengan konfirmasi bank.
Pengendalian Internal	Mengidentifikasi dan menelusuri selisih saldo serta meminta klarifikasi dari manajemen.	Auditor perlu mempertanyakan kebenaran atas selisih saldo kepada pihak manajemen.	Sudah sesuai, karena memiliki prosedur dalam berkomunikasi dengan manajemen.
Mutasi Saldo Kas	Memeriksa mutasi saldo dan memastikan hak pemertintah serta pencatatan pendapatan.	Auditor harus mengevaluasi kelengkapan pencatatan transaksi serta kewajaran mutasi kas.	Sudah sesuai, karena ada pengujian mutasi dan bukti pendukung.
Kecukupan Pengungkapan	Evaluasi kecukupan pengungkapan kas dalam laporan keuangan BLUD.	Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang cukup agar pemakai laporan dapat memahami posisi kas.	Sudah sesuai, karena terdapat evaluasi penyajian dan pengungkapan kas.

Prosedur verifikasi dokumen keuangan dilakukan auditor dengan membandingkan saldo kas yang tercantum dalam buku besar, neraca saldo, rekening koran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Langkah ini menunjukkan kesesuaian dengan SA 500 yang mewajibkan auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Verifikasi tersebut menjadi dasar untuk menarik kesimpulan awal mengenai kewajaran saldo kas. Selain itu, penggunaan dokumen utama dan relevan dalam proses ini memperkuat keandalan bukti audit yang dikumpulkan. Bukti audit berbasis dokumen juga penting dalam mengevaluasi konsistensi pencatatan kas selama periode audit. Auditor tidak hanya meninjau satu sumber, melainkan melakukan cross-check antar dokumen sebagai bentuk pengujian substantif. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman auditor terhadap pentingnya triangulasi bukti dalam mendukung opini audit. Dengan demikian, langkah ini sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip kecukupan dan kesesuaian bukti yang diatur dalam SA 500.

Pemeriksaan Fisik (*Cash Opname*)

KAP X melaksanakan pemeriksaan fisik kas (*cash opname*) secara langsung di lokasi dan mendokumentasikannya melalui berita acara resmi. Prosedur ini sangat relevan dengan ketentuan SA 500 yang menyatakan bahwa

bukti audit yang bersumber dari observasi langsung memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Pemeriksaan fisik menjadi bagian penting dalam pengujian eksistensi kas dan menghindari risiko rekayasa saldo dalam catatan akuntansi. Dengan melihat dan menghitung kas secara nyata, auditor dapat memastikan bahwa saldo kas benar-benar tersedia dan tidak hanya tercatat secara administratif. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya saldo fiktif atau penggelapan dana. Dokumentasi dalam bentuk berita acara juga memperkuat integritas proses pemeriksaan dan memberikan bukti formal yang sah. Prosedur ini memperlihatkan bahwa auditor telah menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang objektif dan berdasarkan fakta. Oleh karena itu, prosedur *cash opname* oleh KAP X telah sepenuhnya memenuhi prinsip bukti audit yang dapat diandalkan sebagaimana diatur dalam SA 500.

Prosedur Analitis

Dalam pelaksanaan audit, KAP X menerapkan prosedur analitis dengan cara membandingkan saldo kas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta menghitung rasio keuangan seperti *cash ratio*. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi tren atau anomali yang mungkin mengindikasikan salah saji atau ketidakwajaran transaksi kas. Prosedur analitis ini sesuai dengan SA 500 yang mengakui analisis tren dan rasio sebagai bentuk pengumpulan bukti audit awal yang relevan. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian, pendekatan ini juga berguna dalam mengarahkan auditor pada area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Ketika ditemukan fluktuasi yang tidak wajar, auditor dapat melanjutkan

dengan pengujian substantif yang lebih mendalam. Prosedur ini mencerminkan peran auditor dalam mengevaluasi kewajaran angka bukan hanya secara statis, melainkan juga secara dinamis dari waktu ke waktu. Penerapan analisis kuantitatif dalam audit ini juga membantu dalam meningkatkan efisiensi dan fokus pemeriksaan. Dengan demikian, penggunaan prosedur analitis oleh KAP X telah memenuhi ketentuan SA 500 terkait relevansi dan kecukupan bukti audit.

Konfirmasi Eksternal

KAP X melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal dengan mengirimkan permintaan saldo ke bank tempat BLUD menyimpan kasnya, kemudian mencocokkannya dengan catatan internal. Prosedur ini sangat penting karena konfirmasi dari pihak ketiga merupakan salah satu bentuk bukti audit yang paling andal menurut SA 500. Bukti yang berasal dari sumber independen eksternal seperti bank memiliki risiko bias yang rendah dan dapat memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada auditor. Dalam hal ini, auditor tidak hanya menerima konfirmasi secara pasif, tetapi juga melakukan rekonsiliasi saldo untuk memastikan tidak ada perbedaan material. Apabila terdapat selisih, auditor dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Konfirmasi bank juga menjadi tolok ukur atas keabsahan catatan saldo akhir periode yang dilaporkan dalam

laporan keuangan. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur konfirmasi oleh KAP X tidak hanya sesuai, tetapi juga sangat mendukung prinsip keandalan bukti sebagaimana dimaksud dalam SA 500.

Pengendalian Internal

Prosedur pengendalian internal dilaksanakan dengan menelusuri selisih saldo kas yang ditemukan dan meminta klarifikasi kepada pihak manajemen BLUD. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak hanya melakukan pemeriksaan teknis, tetapi juga menilai sistem pengendalian internal atas kas. SA 500 menekankan pentingnya auditor mengevaluasi keandalan informasi yang diperoleh, termasuk melalui komunikasi dengan manajemen atas temuan yang bersifat tidak biasa. Penelusuran selisih kas ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahwa tidak terdapat salah saji material yang belum dijelaskan. Klarifikasi dari manajemen menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah selisih tersebut berasal dari kesalahan teknis, waktu pencatatan, atau kemungkinan fraud. Evaluasi ini juga berguna untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, auditor telah menjalankan fungsi detektif sekaligus preventif sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam SA 500. Maka dari itu, prosedur ini mencerminkan kepatuhan penuh terhadap standar audit.

Mutasi Saldo Kas

KAP X melakukan pemeriksaan atas mutasi saldo kas dengan menelusuri setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran selama periode audit. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan

lengkap dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi. SA 500 menyatakan bahwa auditor perlu memperoleh bukti mengenai kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Dalam pelaksanaannya, auditor menelaah dokumen pendukung seperti bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran, dan jurnal transaksi untuk memastikan keterjadian serta klasifikasi transaksi secara tepat. Prosedur ini penting untuk mendeteksi adanya transaksi yang belum dicatat atau dicatat ganda. Auditor juga memastikan bahwa hak dan kewajiban pemerintah daerah terhadap dana BLUD telah dicatat sesuai. Dengan pendekatan ini, auditor telah menjalankan tugasnya untuk menilai kewajaran mutasi saldo, serta menyiapkan dasar dalam menilai kewajaran saldo akhir kas. Prosedur ini menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap prinsip kecukupan dan akurasi bukti sebagaimana diatur dalam SA 500.

Kecukupan Pengungkapan Kas

Aspek terakhir yang dinilai adalah kecukupan pengungkapan kas dalam laporan keuangan BLUD. Auditor melakukan evaluasi terhadap penyajian kas apakah telah disampaikan secara jelas dan mencakup seluruh informasi penting. SA 500 menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang cukup untuk memungkinkan pemakainya memahami pos-pos keuangan secara memadai. Dalam konteks

ini, auditor memeriksa apakah klasifikasi kas dan setara kas telah dilakukan dengan benar, serta apakah terdapat catatan tambahan atau CALK yang menjelaskan saldo kas secara rinci. Evaluasi juga mencakup transparansi atas sumber dana kas, pembatasan penggunaannya, dan kepemilikannya. Tujuan akhirnya adalah agar laporan keuangan tidak menyesatkan dan mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya. Prosedur ini penting dalam menjaga akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan BLUD. Maka, berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa KAP X telah memenuhi ketentuan SA 500 dalam hal kecukupan pengungkapan.

4. KESIMPULAN

Prosedur audit kas yang diterapkan oleh KAP X pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara konsisten menunjukkan kesesuaian dengan Standar Audit 500. Ini terbukti dari berbagai aspek audit yang dilakukan, meliputi verifikasi saldo kas melalui dokumentasi, pemeriksaan fisik langsung (kas opname), pelaksanaan prosedur analitis untuk mengidentifikasi tren, konfirmasi saldo dengan pihak eksternal (bank) untuk meningkatkan keandalan, identifikasi dan penelusuran selisih saldo dengan klarifikasi manajemen, pemeriksaan mutasi saldo kas untuk memastikan kelengkapan dan kewajaran pencatatan, hingga evaluasi kecukupan pengungkapan kas dalam laporan keuangan. Keseluruhan prosedur ini mendukung perolehan bukti audit yang memadai dan relevan dalam mendukung kesimpulan audit atas akun kas BLUD. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya

menggunakan metode observasi dan studi dokumentasi tanpa dilengkapi wawancara langsung dengan auditor atau pihak terkait. Hal ini dapat membatasi kedalaman informasi yang diperoleh dan pemahaman terhadap pertimbangan profesional dalam pengambilan keputusan audit. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dan metode dengan melibatkan wawancara untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan audit di sektor publik.

5. REFERENSI

- Alfiansyah, R. M., & Priono, H. (2024). Implementasi Sikadeka untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Politik Kota X. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 615–623.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.2141>
- Ardyan, A., Kartini, T., & Indrawan, A. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Penerapan PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Ciracap. *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 10344–10355.
- Chandra, M. J., Purwadhi, & Syarifuddin, D. (2025). 3 1,2,3. 5(1), 245–260.
- Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2023). Reliability of Audit Evidence during Pandemic Restrictions. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 6(1), 90–106.
<https://doi.org/10.33005/jasf.v6i1.393>
- Firmansyah, A. (2024). Menguak Titik Lemah BLU : Dampak Pengendalian Internal terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Publik. 8(2), 87–103.
- Hidayah, A. N. (2025). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Kas Berbasis Online. 5(1), 362–384.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). Standar Audit 315 (Revisi 2021) Pengidentifikasian Dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungannya. Standar Profesional Akuntan Publik (SA 315) 2021, 200(Revisi), 1–69.
- Istiqomah, N. A., & Nisa, F. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM KINERJA PELAYANAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (Studi pada BLUD Puskesmas Pabedilan ,. 5(1), 598–618.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.547>
- Pramesti, S. D., & Azmiyanti, R.

(2024). ANALISIS
PROSEDUR AUDIT
KAS DAN SETARA
KAS PADA PT ABC
OLEH KAP
BUNTARAN &
LISAWATI.
[https://doi.org/10.46306/
rev.v5i1](https://doi.org/10.46306/rev.v5i1)

Pramudyastuti, O. L., Nurcahya,
Y. A., & Suryatimur, K.
P. (2025). Remote
Audit : Tantangan Dalam
Peningkatan Kualitas
Audit. 8(1), 10–19.

Puspita, A. I., & Budiwitjaksono,
G. S. (2024). Analisis
Sistem Pengendalian
Internal Kas dan Setara
Kas untuk Mencegah
Fraud pada Rumah Sakit
XYZ.

Sulastiningsih, S., Prasetyo, A.
S., & Suprihatin, E.
(2022). Analisis Kinerja
Keuangan Pada Badan
Layanan Umum Daerah
(Blud) Pusat Kesehatan
Masyarakat Kejajar 1
Wonosobo (Periode
2016-2020). Jurnal Riset
Akuntansi Dan Bisnis
Indonesia, 2(4), 1181–
1205.
[https://doi.org/10.32477/
jrabi.v2i4.617](https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i4.617)

Wulandari, F. R., & Khabibah, N.
A. (2020). Analisis
Pengelolaan Dana Kas
Kecil pada PT Bank
Negara Indonesia
(Persero) Tbk KCU
Magelang. Jesya (Jurnal
Ekonomi & Ekonomi
Syariah), 4(1), 65–73.
[https://doi.org/10.36778/
jesya.v4i1.285](https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.285)